



## PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Jl. Jenderal Sudirman No. 198 Telp. (0761) 32548 – Fax. (0761) 26624  
Website : [www.pta-pekanbaru.go.id](http://www.pta-pekanbaru.go.id) Email : [keuangan@pta-pekanbaru.go.id](mailto:keuangan@pta-pekanbaru.go.id)  
PEKANBARU - 28282

Nomor : W4.A/621 /KU.01/III/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pembayaran Langganan Daya dan Jasa

18 Maret 2016

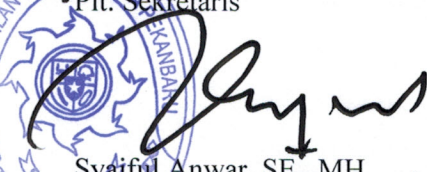
Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Bangkinang  
di  
Bangkinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menanggapi Surat Saudara Nomor W4-A3/416/KU.01/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak dapat memproses permintaan Saudara, karena sesuai Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 perihal Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, bahwa :

1. Pada tahun anggaran 2016 Badan Urusan Administrasi tidak tersedia tambahan anggaran untuk belanja langganan daya dan jasa
2. Pengadilan Agama yang kekurangan pembayaran langganan daya dan jasa disarankan untuk melakukan revisi atau menggeser dari belanja barang operasional (002) dan belanja barang non operasional pada RKA-K/L masing-masing satuan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Plt. Sekretaris  
  
Syariful Anwar, SE., MH  
NIP. 197109111994031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO 9-13 TELP.3843348,3810350,3457661  
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10010

- Yth. 1. Para Kabag Kepegawaian dan Perencanaan Pengadilan Tingkat Banding  
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama  
di 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2016**

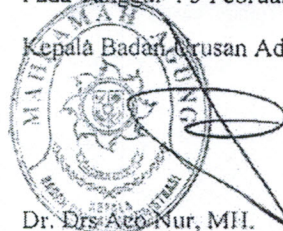
**TENTANG**  
**PEMBAYARAN LANGGANAN DAYA DAN JASA**

Sehubungan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap tahun sehingga berdampak terhadap kurangnya pembayaran listrik pada satuan kerja daerah TA 2016, maka kami sampaikan bahwa DIPA TA 2016 pada satuan kerja Badan Urusan Administrasi *tidak tersedia* tambahan untuk belanja langganan daya dan jasa. Berkenaan dengan hal tersebut apabila ada satuan kerja kekurangan pembayaran listrik disarankan merevisi/menggeser dari *belanja barang operasional (002)* atau *belanja barang non operasional* pada RKA-K/L masing-masing satuan kerja.

Demikian surat edaran ini, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Februari 2016

Kepala Badan Urusan Administrasi



Dr. Drs. Aeo Nur, MH.  
NIP. 19630313 198903 1 021

- Tembusan:  
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;  
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;  
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;